



Literasi Hukum Generasi Z Tertib Berlalu Lintas dan Dokumen Kependudukan Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang

Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti, Evy Indriasari, Fajar Dian Aryani, Achmad Irwan Hamzani

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Jawa Tengah, 52122, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: January 12, 2023
Revised: February 24, 2023
Available online: March 30, 2024

KEYWORDS

Legal Literacy, Traffic Low, Administration and Residency Documents, Generation Z, Improvement.

CORRESPONDENCE

Name: Soesi Idayanti
E-mail: soesi_idayanti@upstegal.ac.id

ABSTRACT

Improving the legal literacy of Generation Z (Gen-Z) especially among the students of the twelfth grade of Higher State High School, is essential to equip them with the knowledge necessary to live in an increasingly complex and globally connected society. Gen-Z is facing a variety of problems in the traffic and specific documentation of the current. The main problems are non-compliance with traffic rules, restricted understanding of traffic regulations, high mobility, less popular use of public transport, reliance on navigation applications can cause drivers to pay less attention to signs and changes in road conditions. Related documents include a lack of understanding of the importance of documents such as a ID card, family card, or birth certificate. Technology and data security challenges where technological advances can bring challenges related to data security and potential risks of population data hacking, restricted access to population services. Improving legal literacy for Gen-Z in Higher State High Schools 1 Advocates require an innovative, holistic, and tailored approach to the characteristics and needs of students. Through effective and inclusive education, Gen- Z, Class XII students of High State High school 1 advocates can better understand their rights and responsibilities in the legal community, including improved understanding of traffic rules and occupation documents, adequate regulation, violation of administrative processes that facilitate access to Gen Z occupation papers and the use of technology to enhance safety and driving awareness among Gen-Z.

Pendahuluan

Literasi telah menjadi istilah yang tidak asing bagi banyak orang, dan penting dipromosikan secara terus-menerus. Literasi adalah inti dari pendidikan sepanjang hayat (Kimiaissa'adah, 2019). Suatu korelasi positif antara kualitas hidup DNA kemajuan suatu bangsa. Orang-orang yang memiliki budaya literasi yang kuat adalah orang-orang yang membangun Indonesia menjadi negara merdeka dan bermartabat dalam sejarahnya (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, 2017). Dalam hal ini, literasi bukan hanya bagaimana suatu masyarakat dapat menghindari buta aksara, tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana masyarakat memiliki kecakapan hidup yang diperlukan untuk bersaing dan berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan (Hamzani et al., 2020). Dengan kata lain, budaya literasi yang baik menunjukkan bahwa suatu bangsa dapat bekerjasama, berpikir kritis, kreatif dan berkomunikasi dengan baik, yang diperlukan untuk memenangi persaingan global (Atmazaki et al., 2017).

Menurut *World Economic Forum* pada tahun 2015, ada enam literasi penting yang dapat ditingkatkan: (1) literasi baca tulis; (2) literasi numerasi; (3) literasi sains; (4) literasi digital; (5) literasi finansial, dan; literasi budaya dan kewargaan. Indeks minat literasi masyarakat Indonesia adalah 0,001 menurut data UNESCO tahun 2002. Artinya, hanya satu dari seribu orang yang tertarik membaca, sehingga dapat disimpulkan menurut data tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat harus terus ditingkatkan (Arif et al., 2019; Hamzani et al., 2020; Patimah, 2015; Perkasa, 2018).

Literasi hukum menjadi salah satu aspek krusial dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan patuh terhadap peraturan yang berlaku (Indriasari et al., 2023). Khususnya pada era digital seperti sekarang ini, dimana informasi tersebar begitu cepat dan akses terhadap berbagai dokumen hukum semakin mudah, kebutuhan akan literasi hukum menjadi semakin penting, terutama bagi generasi muda yang merupakan penerus bangsa (Widyastuti et al., 2024). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat masalah literasi hukum yang spesifik pada generasi Z, yakni generasi yang lahir antara

pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Generasi ini tumbuh dan berkembang dalam era digital yang penuh dengan informasi dan teknologi. Namun, meskipun terbiasa dengan teknologi, literasi hukum mereka sering kali belum tergarap secara memadai.

Generasi Z, juga dikenal sebagai Gen Z, adalah kelompok orang yang lahir setelah generasi Y. Mereka yang termasuk dalam generasi ini adalah mereka yang lahir antara tahun 1995 dan 2010. (Anggarini et al., 2021). Gen Z memegang peranan penting dalam merespons dan mendorong perubahan dalam struktur sosial dan kebijakan administrasi pemerintahan. Mereka, sebagai kelompok yang tumbuh dengan teknologi, memiliki potensi besar dalam mengubah paradigma dan tuntutan terhadap pemerintah. (Oktari, 2023). Pertama, dalam mereduksi sikap permisif terhadap perilaku tidak etis, Gen Z bisa menjadi agen perubahan melalui penggunaan media sosial dan advokasi daring. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengkritik dan menuntut akuntabilitas dari berbagai lembaga dan individu, termasuk pemerintah dan pejabatnya. Dengan akses yang luas terhadap informasi dan jaringan sosial yang kuat, mereka dapat memobilisasi opini publik dan memperjuangkan nilai-nilai etika dan keadilan. Kedua, sebagai pengawas kinerja aktor publik, Gen Z memiliki potensi untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan administrasi kependudukan seperti yang diatur dalam Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) (Darmawan et al., 2023). Dengan keterampilan teknologi dan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai warga negara, mereka dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, untuk memastikan peran Gen Z dalam mendorong penegakan etika dan pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pendidikan mengenai hak-hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, termasuk pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan, harus diperkuat di semua tingkatan pendidikan. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi aktif bagi Gen Z dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan mereka.

Menurut data Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia, Indonesia mengalami peningkatan kasus kecelakaan sebelum pandemi Covid-19, mencapai 104.327 kasus pada tahun 2017, 107.968 kasus pada tahun 2018, dan 116.411 kasus pada tahun 2019. Namun, kasus ini menurun selama masa pandemi menjadi 100.028 kasus pada tahun 2020, dan seiring pelonggaran kebijakan PPKM, kembali meningkat. Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab kematian tertinggi pada kelompok usia 5 hingga 29 tahun, yang termasuk pengendara roda dua, pejalan kaki, dan pesepeda (WHO, 2018). Kendaraan pribadi masih digunakan oleh banyak orang di Indonesia, terutama di kota-kota, karena tidak adanya transportasi publik yang memadai. Data Badan Pusat Statistik dari 2018 hingga 2020 menunjukkan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi. Ini pasti terkait dengan fasilitas yang ada dalam sistem angkutan umum saat ini. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia (Philip et al., 2023).

Pada tahun 2020, data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menunjukkan profil tingkat pendidikan korban kecelakaan di Indonesia. Pelajar dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 80.641 orang, SLTP sebanyak 17.699 orang, dan SD sebanyak 12.557 orang. Pelajar dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 770 orang, S1 sebanyak 3.751 orang, dan S2 sebanyak 136 orang. Secara umum, faktor manusia adalah penyebab terbesar kecelakaan (Hamid et al., 2021). Disisi lain, pengendara muda dan tidak berpengalaman cenderung mengambil perilaku berisiko, yang meningkatkan risiko terlibat dalam kecelakaan, yang merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan pada usia produktif. Banyak kasus kecelakaan yang terjadi pada usia remaja disebabkan oleh ketidakpatuhan dan kurangnya pengetahuan tentang rambu dan marka (Hardini & Indriyati, 2018), yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman pengemudi di kalangan remaja (Ngongo et al., 2019).

Berdasarkan data yang disajikan di atas menggambarkan situasi yang kompleks terkait dengan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi seiring dengan kurangnya transportasi publik yang memadai tampaknya menjadi faktor utama dalam meningkatnya jumlah kecelakaan. Selain itu, faktor manusia, terutama perilaku berisiko dari pengendara muda dan kurangnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas, juga berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan di kalangan remaja. Penekanan pada edukasi dan kesadaran akan keselamatan berkendara perlu ditingkatkan, terutama di kalangan pelajar dengan mengintegrasikan materi keselamatan berkendara ke dalam kurikulum pendidikan.

Beberapa alasan mengapa pengabdian ini dianggap *urgent* karena pertama, dalam era di mana penggunaan jalan raya semakin padat dan kompleks, serta di mana regulasi kependudukan semakin penting untuk akses layanan dan identifikasi pribadi, literasi hukum dalam konteks ini menjadi sangat relevan. Kedua, Generasi Z, yang sering kali sangat terkoneksi dengan teknologi, mungkin memiliki kebutuhan khusus dalam hal pemahaman terkait peraturan dan tata tertib berlalu lintas, serta pentingnya dokumen kependudukan. Ketiga, kesempatan pendidikan praktis, pengabdian semacam ini memberikan kesempatan praktis bagi siswa untuk belajar tentang aspek-aspek hukum yang langsung relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Keempat, mengatasi kekurangan literasi hukum, sering kali kurang diperhatikan dalam kurikulum pendidikan formal. Dengan demikian, fokus pada literasi hukum dalam konteks tertentu dapat membantu mengatasi kekurangan ini. Serta memiliki potensi dampak jangka panjang, dengan meningkatkan literasi hukum di kalangan generasi muda dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, termasuk mengurangi risiko pelanggaran hukum dan kecelakaan berlalu lintas, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Widyastuti, 2023). Oleh karena itu, pengabdian ini dianggap mendesak karena mengatasi kebutuhan spesifik dalam masyarakat, memperbaiki literasi hukum generasi Z dalam konteks tertentu, dan memiliki potensi dampak positif yang besar dalam jangka panjang.

Sebagai wujud mengabdikan diri kepada masyarakat, perguruan tinggi bertanggung jawab mengembangkan gerakan literasi masyarakat, yang mencakup kegiatan literasi untuk semua orang, tanpa memandang usia. Sebagai pusat pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat, tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan belajar bersama dan membangun pengetahuan terus berlangsung dan berkelanjutan. Fokus pengabdian kepada masyarakat ini adalah pada literasi hukum generasi Z terkait dengan kedisiplinan berlalu lintas dan pemahaman dokumen kependudukan. Program pengabdian kepada masyarakat dibuat oleh para dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal untuk kebaruan dari pengabdian tersebut mungkin terletak pada fokusnya yang spesifik pada literasi hukum, khususnya terkait dengan tertib berlalu lintas dan dokumen kependudukan, yang ditujukan untuk generasi Z, terutama siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang.

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yakni penyuluhan hukum berbasis tatap muka Hamzani et al. (2024), dan menyampaikan materi tentang Regulasi Lalu Lintas dan Dokumen Kependudukan di Indonesia, disertai dengan contoh-contoh pelanggaran. Luaran kegiatan berupa laporan akhir dan artikel publikasi PKM. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Adapun peserta yang ditargetkan adalah siswa kelas XII. Hal ini dikarenakan gen-Z yang merupakan siswa kelas XII, sudah dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya mereka memiliki Kartu Induk Anak (KIA), sehingga optimalisasi penggunaan kartu tersebut sesuai regulasi yang ada dan mitigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran dikemudian hari.

Upaya peningkatan literasi hukum secara konkrit dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan adalah aktifitas komunikasi untuk mengelola informasi dengan tujuan untuk perubahan sikap (Hidayah & Komariah, 2022). Penyuluhan hukum ini dilakukan kepada Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang. Penyuluhan diberikan dengan tujuan meningkatkan literasi siswa terhadap tertib berlalu lintas dan dokumen kependudukan, dimana kontribusi penyuluhan berupa peningkatan pemahaman regulasi, dan implikasi tertib berlalu lintas dan dokumen administrasi kependudukan dikemudian hari.

Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan hukum kepada siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang, mengenai tertib berlalu lintas dan dokumen administrasi kependudukan diawali dengan tahapan persiapan dengan observasi dan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemalang Ibu Dra. Uti Wisnuharti, M.M, didampingi waka bidang humas. Penyuluhan hukum dilandasi dengan maraknya geng-geng motor dan kecelakaan lalu lintas yang melakukan pelanggaran di Wilayah Polres Pemalang, serta penyalahgunaan identitas kependudukan pada platform digital pinjaman online yang melibatkan gen-Z.

Pembahasan tentang literasi hukum bagi Generasi Z, khususnya terkait tertib berlalu lintas dan dokumen kependudukan, adalah hal yang penting mengingat peran penting hukum dalam kehidupan

sehari-hari. Untuk siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang atau siapa pun yang termasuk dalam Generasi Z, pemahaman yang kuat tentang hukum berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mengenai tertib berlalu lintas terdapat beberapa hal sebagai berikut: Pertama, melalui literasi hukum, siswa harus memahami peraturan lalu lintas yang berlaku di negara mereka. Ini mencakup pemahaman tentang rambu-rambu, tanda-tanda, aturan di jalan, dan hukum terkait seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, serta batas kecepatan. Kedua, mempelajari konsekuensi dari melanggar aturan lalu lintas juga penting. Ini dapat termasuk sanksi hukum seperti denda, poin penalti pada SIM, atau bahkan penahanan. Ketiga, kesadaran akan pentingnya keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan juga harus disoroti. Ini termasuk pemahaman tentang bahaya penggunaan ponsel saat mengemudi, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan perilaku lain yang mengganggu.

Hal terpenting dari literasi hukum mengenai dokumen kependudukan, mencakup pemahaman tentang dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Siswa harus memahami pentingnya memiliki dokumen-dokumen dan bagaimana cara memperolehnya. Selain itu, Penting untuk memahami proses dan persyaratan yang terlibat dalam mendapatkan dokumen-dokumen ini serta konsekuensi hukum dari memiliki dokumen palsu atau tidak sah. Kesadaran akan pentingnya menjaga dokumen-dokumen ini dengan aman dan tidak memberikannya kepada pihak yang tidak berwenang juga merupakan bagian dari literasi hukum yang penting.

Pelibatan pendidik dan peran sekolah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi hukum siswa. Ini bisa dilakukan melalui pembelajaran formal dalam kurikulum atau melalui kegiatan ekstrakurikuler dan seminar. Simulasi situasi di jalan, diskusi kelompok tentang peraturan lalu lintas, dan studi kasus tentang konsekuensi hukum dari melanggar aturan dapat membantu siswa memahami pentingnya tertib berlalu lintas dan kepatuhan terhadap hukum. Siswa juga dapat diajak untuk berpartisipasi dalam program-program komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah lalu lintas dan kepatuhan terhadap hukum.

Penting untuk diingat bahwa literasi hukum bukan hanya tentang pemahaman teoritis, tetapi juga tentang penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang kuat tentang hukum terkait berlalu lintas dan dokumen kependudukan, Generasi Z dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan sadar hukum. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 diawali dengan sambutan ibu waka kesiswaan SMA Negeri 1 Pemalang, sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Pancasaksi Tegal dan menyampaikan profil pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.



Gambar 1. Sambutan WakaKesiswaan SMA Negeri 1 Pemalang, mewakili Kepala Sekolah Ibu Uti Wisnuhartati, M.M.

Paparan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan secara bergantian. Paparan materi narasumber pertama tentang tertib berlalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Penyampaian narasumber berlangsung lancar dan siswa merespon dengan antusias melalui tanya jawab.

Narasumber Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H menyampaikan bahwa Generasi Z merupakan generasi muda yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Generasi ini dikenal dengan kecanggihan teknologi dan

media sosial yang mereka gunakan. Namun, di balik kecanggihan tersebut, masih banyak generasi Z yang belum memahami pentingnya tertib berlalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja.

Literasi hukum merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesadaran generasi Z akan pentingnya tertib berlalu lintas. Literasi hukum dapat membantu generasi Z memahami peraturan dan perundang-undangan (Aryani et al., 2024) yang berlaku di jalan raya, serta meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap keselamatan diri dan orang lain. Kegiatan Literasi Hukum Generasi Z Tertib Berlalu Lintas Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi Z tentang tertib berlalu lintas. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu generasi Z menjadi pengendara yang lebih bertanggung jawab dan disiplin.

Materi yang disampaikan mengenai pengertian tertib berlalu lintas adalah perilaku yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di jalan raya. Tertib berlalu lintas bukan hanya tentang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tetapi juga tentang menghargai hak-hak pengguna jalan lain. Pentingnya tertib berlalu lintas, tertib berlalu lintas sangat penting untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Dengan tertib berlalu lintas, kita dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan korban jiwa dan materi.

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas, di antaranya: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kendaraan Bermotor; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disampaikan pula tips tertib berlalu lintas untuk generasi Z, dimana selalu gunakan helm saat berkendara sepeda motor, patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan lampu kendaraan sesuai dengan kondisi jalan, jangan berkendara dengan kecepatan tinggi, jangan berkendara sambil bermain *handphone*, jangan berkendara di bawah pengaruh alkohol atau narkoba.

Generasi Z memiliki potensi besar untuk menjadi pengendara yang tertib dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang tertib berlalu lintas, diharapkan generasi Z dapat menjadi generasi yang lebih aman dan selamat di jalan raya. Kegiatan Literasi Hukum Generasi Z Tertib Berlalu Lintas Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran generasi Z tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Dengan tertib berlalu lintas, kita dapat menciptakan jalan raya yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.



Gambar 2. Paparan Narasumber tentang tertib berlalu lintas

Disampaikan kemudian mengenai administrasi dan dokumen kependudukan oleh narasumber berikutnya Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan yang menyusun dan mengendalikan pelepasan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya dalam pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan (Darmawan et al., 2023). Pengelolaan suatu pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari tingkat kelurahan/desa selaku ujung tombak pendaftaran kependudukan. Oleh

karena itu, sebagai ujung tombak pelaksanaan administrasi kependudukan, desa harus menyampaikan setiap program yang ada kepada masyarakat dan memberikan edukasi terhadap program tersebut sehingga warga setempat dapat terdaftar secara administrasi dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Darmawan et al., 2023).

Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang penting bagi setiap warga negara. Dokumen ini berfungsi untuk membuktikan identitas dan status kewarganegaraan seseorang. Dokumen kependudukan juga diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan, seperti membuka rekening bank, mendaftarkan sekolah, melamar pekerjaan, dan sebagainya. Ada beberapa jenis dokumen kependudukan yang penting bagi warga negara Indonesia, antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian. Dokumen kependudukan memiliki beberapa manfaat penting bagi warga negara, antara lain: membuktikan identitas dan status kewarganegaraan seseorang, diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan, membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan, menjaga keamanan negara.

Sebagai warga negara, setiap orang memiliki hak dan kewajiban terkait dengan dokumen kependudukan. Pertama, hak warga negara atas dokumen kependudukan sebagai berikut : setiap warga negara berhak untuk: mendapatkan dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat; memperoleh informasi tentang cara mengurus dokumen kependudukan dan mendapat pelayanan yang baik dan mudah dalam mengurus dokumen kependudukan. Sedangkan kewajiban warga negara terkait dokumen kependudukan yakni setiap warga negara wajib untuk menjaga dokumen kependudukan dengan baik, melaporkan perubahan data diri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan menggunakan dokumen kependudukan untuk keperluan yang sah.

Diuraikan pula oleh narasumber Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H, mengenai cara untuk mengurus dokumen kependudukan. Pertama, cara mengurus kartu tanda penduduk (KTP), datang ke Disdukcapil setempat, membawa persyaratan yang diperlukan, seperti KK, Akta Kelahiran, dan surat nikah (bagi yang sudah menikah), mengisi formulir permohonan, melakukan foto dan sidik jari dan menunggu proses pencetakan KTP. Kedua, cara mengurus kartu keluarga (KK) yakni datang ke Disdukcapil setempat, membawa persyaratan yang diperlukan, seperti KTP orang tua/wali, Akta Kelahiran anak-anak, dan surat nikah (bagi yang sudah menikah), mengisi formulir permohonan dan menunggu proses pencetakan KK. Terakhir cara mengurus akta kelahiran yakni datang ke rumah sakit atau bidan tempat anak dilahirkan dan membawa persyaratan yang diperlukan, seperti surat keterangan lahir dari rumah sakit/bidan, KTP, Buku Nikah Orang Tua, saat ini pemerintah mengintegrasikan untuk dokumen anak yang baru lahir akan otomatis mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Anak Indonesia.



Gambar 3. Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 1 Pemalang

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Literasi Hukum Generasi Z Tertib Berlalu Lintas dan Dokumen Kependudukan Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang, dan tanya jawab dengan siswa selama proses pemaparan materi dapat disimpulkan beberapa hal berikut : pengetahuan siswa tentang hukum lalu lintas dan dokumen kependudukan masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil tes

awal yang menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum mengetahui aturan lalu lintas dan persyaratan untuk mengurus dokumen kependudukan, siswa antusias mengikuti kegiatan. Hal ini terlihat dari partisipasi siswa yang aktif selama kegiatan berlangsung, baik dalam sesi ceramah, diskusi, maupun praktik. Kegiatan ini bermanfaat bagi siswa. Hal ini terlihat dari hasil tes akhir yang menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang hukum lalu lintas dan dokumen kependudukan meningkat setelah mengikuti kegiatan.

Diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat literasi hukum Generasi Z tertib berlalu lintas dan dokumen kependudukan siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang hukum lalu lintas dan dokumen kependudukan. Hal ini diharapkan dapat membantu siswa untuk menjadi pengguna jalan yang tertib dan patuh hukum, serta dapat mengurus dokumen kependudukan dengan mudah dan cepat.

kegiatan pengabdian kepada masyarakat literasi hukum Generasi Z tertib berlalu lintas dan dokumen kependudukan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang memiliki beberapa implikasi berikut: meningkatkan keselamatan di jalan raya. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan siswa tentang hukum lalu lintas, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan di jalan raya, memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dengan meningkatnya pengetahuan siswa tentang dokumen kependudukan, diharapkan dapat memudahkan pengurusan dokumen kependudukan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keselamatan di jalan raya dan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat literasi hukum generasi z tertib berlalu lintas dan dokumen kependudukan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa dan masyarakat. Kegiatan ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Rangkaian Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di SMA Negeri 1 Pemalang, ditutup dengan pemberian plakat kepada sekolah dan doorprize bagi siswa yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi keaktifan dan antusias siswa dalam kegiatan ini.



Gambar 4. Penyerahan Plakat Kepada Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Pemalang

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan penyuluhan hukum terkait literasi regulasi tertib lalu lintas dan dokumen administrasi kependudukan pada Kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang sebagai partisipan. Peserta berhasil mengikuti kegiatan dengan baik dan mendapatkan pengalaman serta beragam permasalahan kehidupan Gen-Z. Beberapa peserta juga melakukan diskusi mendalam terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Keantusiasan peserta mengharapakan kegiatan penyuluhan hukum dapat dilakukan secara rutin dengan tema hukum yang beragam sehingga tercipta peningkatan literasi hukum, demi terciptanya masyarakat terutama Gen-Z yang sadar hukum dan tertib.

Beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat literasi hukum Generasi Z tertib berlalu lintas dan dokumen kependudukan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang di masa depan: (1) meningkatkan materi pelatihan. Materi pelatihan perlu diperbarui secara berkala dengan informasi terbaru tentang hukum lalu lintas dan dokumen kependudukan: (2)

memvariasikan metode pelatihan. Metode pelatihan perlu divariasikan agar lebih menarik dan interaktif bagi siswa, dan; (3) melibatkan lebih banyak pihak. Kegiatan ini perlu melibatkan lebih banyak pihak, seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Disdukcapil, agar dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada siswa.

Daftar Pustaka

- Anggarini, D. R., Putri, A. D., & Lina, L. F. (2021). Literasi Keuangan untuk Generasi Z di MAN 1 Pesawaran. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 1(1), 147-152. <https://doi.org/10.54082/jamsi.42>
- Arif, E., Budi, B., & Roem, E. R. (2019). Pemanfaatan Media Sosial. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 3(1), 34-44. <https://doi.org/10.25077/rk.3.1.34-44.2019>
- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Sanusi. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39-49. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>
- Atmazaki, A., Ali, N. B. V., Muldian, W., Miftahussururi, M., Hanifah, N., Nento, M. N., & Akbari, Q. S. (2017). *Panduan gerakan literasi nasional*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Darmawan, A., Fitriana, J., Setiawan, A. A., & Safira, A. S. (2023). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan. *Jurnal Bina Desa*, 4(3), 296-303. <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.32542>
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. (2017). *Panduan penyelenggaraan program kampung literasi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hamid, A., Kusumawati, N., & Lestari, R. R. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 1(1), 1-8. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jiik/article/download/1423/1076>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Mohd Rusli, M. H. (2024). Implementation approach in legal research. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 13(2), 380-388. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(2), 56-61. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3>
- Hardini, P., & Indriyati, E. W. (2018). Pengetahuan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Berlalu Lintas; Tinjauan Terhadap Pelaku Lalu Lintas Usia Remaja Di Smk Ypt 1 Purbalingga. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1(3), 138. <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i3.14787>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2022). Upaya Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Tentang Peer to Peer Lending. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.20914>
- Indriasari, E., Widyastuti, T. V., Aryani, F. D., Mahardika, D., & Hamzani, A. I. (2023). Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum Bagi Siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah' Kota Tegal. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(1), 181-190. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.865>
- Kimiaissa'adah, N. (2019). *Implementasi gerakan literasi membaca dalam menumbuhkembangkan minat baca anak usia dini di TK IT Mutiara Hati Semarang*. UNNES.
- Ngongo, O. L., Berek, N. C., & Talahatu, A. H. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Pengemudi Sepeda Motor di Sumba Barat. *Timorese Journal of Public Health*, 1(4), 170-176. <https://doi.org/10.35508/tjph.v1i4.2147>
- Oktari, Y. (2023). Urgensi Etika Pejabat Publik dan Peranan Generasi Z dalam Studi Administrasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 009(01), 11-20. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap/2023.009.01.2>
- Patimah, P. (2015). Efektifitas metode pembelajaran dongeng dalam meningkatkan kemampuan literasi anak pada jenjang usia sekolah dasar. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 2(2). <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v2i2.123>
- Perkasa, M. (2018). Bahan ajar berorientasi environmental sustainability education berintegrasi kearifan lokal unruk meningkatkan literasi sains mahasiswa. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 246-256. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i10>

- Philip, F. J., Permanasari, E., & Anjani, A. D. (2023). Edukasi Perilaku Berkendaraan Aman Kepada Generasi Z SMP Seruni Putih Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2), 506-515. <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i2.411>
- WHO. (2018). *Global Status Report on Road Safety 2018*. World Health Organization.
- Widyastuti, T. V., Indriasari, E., Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Hamzani, A. I., Mashdurohatun, A., & Nuridin. (2024). Lelang sebagai instrumen jual beli berkarakter khusus dan pencegahan cyber crime. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 22-29. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21458>
- Widyastuti, T. V. (2023). *Perbandingan Hukum Perdata: Teori dan Praktek dalam Masyarakat Internasional*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.